

Rangkuman Diskusi Policy Talks

”Kesiapan-Kerentanan Iklim Provinsi dan Kebijakan Iklim di Indonesia”

Tempat	Zoom Meeting
Hari / Tanggal	Kamis, 21 Juli 2026
Waktu	14.00-16.00
Narasumber	Pembicara: 1. Putu Rusta Adijaya, (Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research) 2. Dr. Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno, S.H., M.H. (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) 3. Tata Mustasya, Direktur Eksekutif SUSTAIN Moderator: Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute)
Penyelenggara	The Indonesian Institute
Peserta	Daring

PEMBAHASAN

Diskusi dibuka oleh Made Natasya Restu Dewi Pratiwi selaku moderator. Dalam pembukaan, moderator memperkenalkan para narasumber, yaitu Dr. Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno selaku Wakil Ketua MPR RI, Putu Rusta Adijaya selaku Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, serta Tata Mustasya selaku Direktur Eksekutif SUSTAIN.

Paparan Putu Rusta Adijaya

Putu Rusta Adijaya memaparkan hasil kajian The Indonesian Institute mengenai kesiapan dan kerentanan iklim di tingkat provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga telah berkembang menjadi isu ekonomi politik global. Salah satu contohnya adalah munculnya berbagai kebijakan karbon lintas batas (*cross-border carbon policy*) yang semakin memengaruhi negara-negara Global South, termasuk Indonesia.

Berdasarkan hasil survei yang menjadi bagian dari penelitian tersebut, sekitar 86 persen masyarakat Indonesia menilai bahwa kejadian bencana pada tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak bencana tersebut tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Penelitian ini menggunakan ND-GAIN Index untuk mengukur tingkat kesiapan (*readiness*) dan kerentanan (*vulnerability*) provinsi di Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Putu menjelaskan bahwa perubahan iklim merupakan bentuk eksternalitas negatif sehingga memerlukan intervensi kebijakan, termasuk melalui instrumen ekonomi seperti Pigouvian Tax. Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya kebebasan ekonomi, perlindungan hak kepemilikan (*property rights*), serta kualitas regulasi sebagai faktor yang memengaruhi

kesiapan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan kesiapan iklim antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kesiapan yang baik, sementara Papua Pegunungan masih berada pada tingkat kesiapan yang rendah. Berdasarkan hasil klusterisasi, provinsi dengan tingkat kesiapan tinggi masih didominasi oleh wilayah Jawa, Bali, dan kawasan aglomerasi. Sementara itu, provinsi lain masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek tata kelola pemerintahan. Indikator kesiapan ekonomi, kesiapan tata kelola, dan kesiapan sosial menunjukkan bahwa DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali memiliki tingkat kesiapan yang relatif baik, sedangkan sebagian besar provinsi di wilayah Papua masih menunjukkan tingkat kesiapan yang rendah.

Tanggapan Dr. Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno

Dr. Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno menyampaikan bahwa MPR memiliki peran sebagai penjaga konstitusi agar seluruh amanat Undang-Undang Dasar dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, perlindungan lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menjadi dasar komitmen negara terhadap pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pak Eddy menegaskan bahwa kondisi saat ini lebih tepat disebut sebagai krisis iklim, bukan sekadar perubahan iklim. Menurutnya, krisis tersebut disebabkan oleh tingginya emisi gas rumah kaca dan proses transisi energi yang belum berjalan secara teratur (*disorderly transition*). Indonesia perlu terus mengembangkan sumber daya nonenergi dan sektor-sektor ekonomi yang lebih rendah emisi tanpa mengabaikan aspek ketahanan energi (*energy security*) agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi.

Ia juga menyoroti meningkatnya berbagai bencana di sejumlah daerah, seperti Aceh dan Sumatera Barat. Menurutnya, degradasi fungsi ekologis menyebabkan kemampuan lingkungan dalam menyerap air semakin menurun sehingga hujan dengan intensitas tinggi lebih mudah memicu banjir, angin kencang, maupun cuaca ekstrem lainnya. Oleh karena itu, upaya menghadapi krisis iklim perlu dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu mitigasi dengan mengurangi emisi karbon dan meningkatkan bauran energi bersih, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Pak Eddy juga menyinggung persoalan penurunan muka tanah yang mencapai sekitar 2–3 sentimeter per tahun di sejumlah wilayah, sehingga pemerintah merencanakan pembangunan Giant Sea Wall serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari strategi adaptasi.

Selain itu, Pak Eddy menyampaikan bahwa berdasarkan hasil audiensi dan dialognya dengan akademisi, mahasiswa, serta aktivis lingkungan di berbagai kampus di Indonesia, pemahaman mengenai krisis iklim masih belum merata. Menurutnya, masih diperlukan pendalaman data dan peningkatan pemahaman mengenai isu krisis iklim di berbagai daerah.

Ia juga menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar di daerah adalah keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan partisipasi pemerintah daerah dalam aksi iklim masih terhambat, terutama dalam pengelolaan sampah. Indonesia menghasilkan sekitar 56 juta ton sampah per tahun, namun hanya sekitar 40 persen yang berhasil dikelola. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di berbagai daerah juga telah mencapai sekitar 85–90 persen, sehingga sering terjadi longsor maupun kebakaran sampah yang membutuhkan waktu lama untuk dipadamkan.

Menurutnya, pengembangan pembangkit listrik berbasis sampah juga masih menghadapi

berbagai kendala, salah satunya belum tersedianya tipping fee di banyak daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah, baik perkotaan maupun perdesaan, juga menjadi hal yang penting agar pemerintah daerah mampu mengelola persoalan lingkungan secara lebih baik.

Pak Eddy menambahkan bahwa Indonesia perlu mencari jalan tengah dalam proses transisi energi. Batu bara masih menjadi sumber energi utama sehingga diperlukan pengembangan sumber energi dan mineral lain sebagai penggantinya. Program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang didukung pembiayaan sekitar US\$25 miliar diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membangun ekonomi baru sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi.

Menjawab pertanyaan mengenai langkah yang dilakukan MPR saat ini, Pak Eddy menjelaskan bahwa MPR mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, seperti hutan dan mangrove. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai proyek yang memberikan nilai tambah bagi daerah, dikelola oleh lembaga yang berwenang, serta memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat setempat.

Paparan Tata Mustasya

Menanggapi hasil kajian yang dipaparkan sebelumnya, Tata Mustasya, Direktur Eksekutif SUSTAIN, menekankan bahwa kajian mengenai kesiapan iklim di tingkat provinsi menjadi semakin penting di tengah kecenderungan sentralisasi berbagai kebijakan di tingkat nasional. Menurutnya, kebijakan perubahan iklim tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik, tingkat kerentanan, serta kapasitas adaptasi yang berbeda. Perbedaan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur menuntut strategi mitigasi dan adaptasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Tata juga menjelaskan bahwa dampak perubahan iklim semakin dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satunya adalah fenomena *climateflation*, yaitu kenaikan harga barang, khususnya pangan, akibat terganggunya produksi dan distribusi sebagai dampak perubahan iklim. Kondisi ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, krisis ketersediaan air bersih diperkirakan akan menjadi tantangan yang semakin serius apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.

Lebih lanjut, Tata menekankan bahwa kebijakan perubahan iklim seharusnya tidak dipandang sebagai beban biaya (*cost*), melainkan sebagai investasi jangka panjang yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurutnya, investasi pada upaya mitigasi dan adaptasi akan jauh lebih efisien dibandingkan biaya yang harus ditanggung akibat kerugian bencana dan dampak perubahan iklim di masa mendatang. Dalam konteks tersebut, pengembangan *green jobs* dan kewirausahaan hijau (*green entrepreneurship*) juga menjadi peluang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan iklim.

Di sisi lain, Tata mengakui bahwa implementasi kebijakan iklim masih menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia menyoroti belum konsistennya komitmen negara-negara maju terhadap agenda perubahan iklim, keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah, serta meningkatnya tekanan ekonomi terhadap kelas menengah sebagai faktor-faktor yang dapat menghambat percepatan transisi menuju pembangunan rendah karbon. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional agar agenda perubahan iklim tetap menjadi prioritas pembangunan nasional.

Sesi Tanya Jawab

Moderator mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana cara mengomunikasikan isu perubahan iklim kepada generasi muda. Menurut moderator, selama ini pendekatan berbasis *lifestyle* sering dijadikan pintu masuk dalam kampanye lingkungan. Namun, bagaimana sebaiknya isu iklim dikemas agar lebih relevan dengan kehidupan anak muda.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Tata Mustasya menjelaskan bahwa isu perubahan iklim perlu dikaitkan dengan persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah fenomena *climateflation*, yaitu meningkatnya biaya hidup akibat dampak perubahan iklim. Selain itu, dampak perubahan iklim seperti gelombang panas yang memengaruhi kesehatan juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Di sisi lain, perubahan iklim juga dapat dipandang sebagai peluang melalui pengembangan *green jobs*, kewirausahaan hijau (*green entrepreneurship*), serta berbagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Menambahkan hal tersebut, Putu Rusta Adijaya menyampaikan bahwa isu lingkungan masih menjadi salah satu isu dengan tingkat perhatian yang relatif rendah di kalangan generasi muda dibandingkan isu ekonomi. Oleh karena itu, komunikasi mengenai perubahan iklim perlu dikaitkan dengan persoalan kesejahteraan (*well-being*), kesempatan kerja, biaya hidup, dan ekonomi mikro agar lebih relevan dengan kehidupan anak muda. Menurutnya, isu perubahan iklim selama ini masih dianggap terlalu teknis sehingga perlu dijemput dengan dampak nyata terhadap pendapatan dan kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, moderator mengajukan pertanyaan kepada Tata Mustasya terkait prioritas kebijakan iklim untuk perbaikan kualitas air dan fenomena *climate flation*. Pertanyaan tersebut dikaitkan dengan hasil kajian The Indonesian Institute yang menunjukkan bahwa Papua Pegunungan memiliki akses air minum layak terendah secara nasional, yaitu sebesar 32,89 persen, serta tingkat kesiapan ekonomi yang sangat rendah. Moderator menanyakan bagaimana skema pendanaan iklim, seperti pajak karbon maupun alokasi insentif, dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar air bersih di wilayah rentan agar manfaat kebijakan iklim tidak hanya dirasakan oleh daerah yang telah memiliki pasar ekonomi yang maju.

Menanggapi hal tersebut, Tata Mustasya menjelaskan bahwa terdapat dua hal utama dalam pembiayaan aksi iklim. Pertama, peningkatan penerimaan negara melalui instrumen seperti pungutan batu bara dan instrumen karbon. Kedua, penguatan mekanisme *earmarking policy*, yaitu pengalokasian anggaran khusus untuk aksi iklim berdasarkan indikator yang jelas mengenai kondisi sosial ekonomi, tingkat kerusakan lingkungan, serta kebutuhan masing-masing daerah. Menurutnya, daerah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi harus memperoleh prioritas dalam alokasi pembiayaan. Ia juga menyoroti bahwa persoalan akses terhadap air bersih yang berkualitas masih menjadi tantangan besar. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap air minum kemasan juga meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, penerimaan dari instrumen karbon di Indonesia masih relatif terbatas sehingga diperlukan mekanisme pengalokasian anggaran yang lebih efektif untuk mendukung aksi iklim.

Menanggapi hal tersebut, Putu Rusta Adijaya menyampaikan bahwa hasil kajian TII menunjukkan kualitas regulasi, kapasitas kelembagaan, kebebasan ekonomi, dan tata kelola merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesiapan iklim daerah. Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah akibat menurunnya transfer ke daerah dan dana desa membuat banyak pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, berbagai sumber pembiayaan alternatif, seperti Green Climate Fund, perlu dimanfaatkan untuk mendukung aksi iklim dan menghasilkan eksternalitas positif.

Selanjutnya, peserta Adinda mengajukan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah daerah

memiliki ruang untuk memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung kebijakan adaptasi perubahan iklim, serta apakah green jobs di Indonesia telah didukung oleh kapasitas sumber daya manusia dan lapangan kerja yang memadai.

Menjawab pertanyaan tersebut, Tata Mustasya menekankan bahwa kesadaran para pembuat kebijakan (policymakers) menjadi faktor yang sangat penting. Menurutnya, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Tiongkok dalam mengembangkan industri kendaraan listrik dan transisi energi melalui visi politik yang jelas, pemberian insentif bagi sektor yang ramah lingkungan, serta disinsentif bagi sektor yang menghasilkan emisi tinggi. Kebijakan yang konsisten akan memberikan sinyal yang jelas bagi masyarakat dan dunia usaha untuk beralih menuju ekonomi hijau. Ia menilai Indonesia memiliki modal besar berupa bonus demografi dan sumber daya alam, namun diperlukan arah kebijakan yang tepat agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga perlu memahami peran masing-masing dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Menambahkan hal tersebut, Putu Rusta Adijaya menjelaskan bahwa transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi memerlukan proses bertahap, termasuk perubahan pola pikir masyarakat. Menurutnya, peluang green jobs cukup besar, misalnya pada sektor pembangkit listrik tenaga air, audit energi, dan bidang *data science*. Meskipun pemerintah telah memiliki komitmen menciptakan sekitar 19 juta lapangan kerja hijau, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kepentingan politik dan keterbatasan kapasitas. Oleh karena itu, diperlukan advokasi kepada para pemangku kepentingan melalui pendekatan evidence-based policy, termasuk analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*). Tata Mustasya menambahkan bahwa komitmen pemerintah perlu diikuti dengan kebijakan yang konsisten agar transisi menuju ekonomi hijau dapat dipersiapkan dengan baik.

Peserta kemudian mengajukan pertanyaan mengenai konsistensi negara-negara Global North yang aktif menyuarakan isu perubahan iklim, namun dinilai masih belum optimal dalam memberikan dukungan pembiayaan kepada negara-negara Global South.

Menanggapi hal tersebut, Putu Rusta Adijaya menjelaskan bahwa persoalan pendanaan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam forum perubahan iklim internasional. Ia menyinggung bahwa berbagai komitmen pendanaan yang dijanjikan sebelum COP30, termasuk target mobilisasi dana sebesar US\$100 miliar, belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, dinamika geopolitik dan kondisi politik domestik masing-masing negara juga memengaruhi implementasi berbagai komitmen tersebut. Menurutnya, selama negara-negara Global South mampu memperkuat posisi bersama, peluang untuk mendorong komitmen global akan semakin besar.

Sementara itu, Tata Mustasya menilai bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada dukungan pendanaan dari negara-negara maju, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan aksi iklim. Menurutnya, Indonesia perlu menempatkan agenda perubahan iklim sebagai bagian dari agenda pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Dengan tata kelola yang baik dan arah kebijakan yang jelas, Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari proses transisi energi. Namun demikian, pembiayaan tetap menjadi salah satu tantangan terbesar.

Menjawab pertanyaan mengenai praktik baik dalam mendorong green investment, Putu Rusta Adijaya menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai regulasi mengenai ekonomi karbon, termasuk Peraturan Presiden yang mendukung pengembangan investasi berkelanjutan. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah mulai menyelaraskan agenda pembangunan dengan komitmen lingkungan melalui Asta Cita, khususnya pada aspek lingkungan hidup. Putu mencontohkan praktik Tri Hita Karana di Bali yang mengintegrasikan nilai ketuhanan,

hubungan manusia, dan lingkungan sebagai bentuk *local wisdom* dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda sehingga tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam (*no one size fits all*). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu diberikan ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik lokal, didukung oleh pemerintah pusat melalui koordinasi, integrasi, monitoring dan evaluasi, serta pelibatan masyarakat secara bermakna.

Menambahkan hal tersebut, Tata Mustasya menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak praktik baik pada tingkat kebijakan maupun implementasi proyek, termasuk berbagai investasi energi surya di sejumlah perusahaan besar. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan praktik-praktik tersebut dapat diperluas (*scale up*) melalui kepastian kebijakan dan sinyal yang kuat dari pemerintah agar investasi hijau semakin berkembang.

Closing Statement

Dalam penutupan, Tata Mustasya menegaskan bahwa aksi iklim harus dikaitkan dengan agenda pembangunan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu menemukan formulasi kebijakan yang mampu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek maupun panjang. Menurutnya, salah satu sumber pembiayaan yang dapat dioptimalkan adalah penerimaan dari pungutan batu bara dan instrumen karbon.

Sementara itu, Putu Rusta Adijaya menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim. Ia menyampaikan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat serta dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Menurutnya, perubahan iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pihak.